

2024

LAPORAN KINERJA

BIRO HUKUM, KERJA SAMA,
DAN ORGANISASI

(021) 2251 3737 

www.ombudsman.go.id 

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Biro dalam mencapai tujuan/sasaran. LKJ tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Biro diukur berdasarkan indicator dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi. LKJ sebagai sarana evaluasi mandiri atas pencapaian kinerja Biro dalam Upaya penyempurnaan kinerja di tahun mendatang. Semoga pencapaian kinerja Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi berdampak positif guna memberikan dukungan administrasi prima kepada Ombudsman RI bagi perbaikan pelayanan publik.

Jakarta, 31 Desember 2024
Kepala Biro Hukum, Kerja Sama,
dan Organisasi

#

Esti Budiarti, S.H., M.H
NIP. 19700916 199403 2 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi. Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi dalam mencapai sasaran terlaksananya layanan fasilitasi pelayanan teknis terhadap Ombudsman RI yang berkualitas diukur dengan indikator: a) indeks kinerja Biro, dan b) jumlah dokumen Laporan Kinerja, dan Triwulan, dan Tahunan. Indeks kinerja Biro diukur berdasarkan nilai kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat. Aspek implementasi berupa: capaian rincian output, nilai efisiensi unit kerja, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran. Aspek manfaat berupa: kualitas pengelolaan arsip laporan/pengaduan masyarakat, indeks kepuasan pengguna layanan, nilai SAKIP, tingkat kepatuhan kode etik dan kode perilaku, persentase tindak lanjut temuan BPK, rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counselling (CMC), dan persentase tindak lanjut unit kerja atas temuan aduan dan saran penjaminan mutu.

Indeks kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi tahun 2024 telah memenuhi capaian dengan nilai 3,37 (109 %). Jumlah dokumen laporan yang telah disusun: 1 laporan kinerja, 4 laporan triwulan, dan 1 laporan tahunan. Jumlah dokumen laporan yang telah disusun belum memenuhi target dengan realisasi 6 laporan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Sumber Daya Manusia	2
BAB II RENCANA KERJA	6
A. Sasaran Kinerja	6
B. Perjanjian Kinerja.....	6
C. Pohon Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Analisis Kinerja	9
B. Capaian Kinerja	9
C. Evaluasi Keberhasilan Kinerja	17
D. Kinerja Anggaran	19
BAB IV PENUTUP.....	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran dan Solusi	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu alat untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKj), yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu instrumen utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kewenangan Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Dalam pelaksanaan tugas dukungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Ombudsman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia;
- b. Pelayanan administrasi perencanaan, penyusunan laporan, dan keuangan Ombudsman Republik Indonesia;
- c. Pelayanan administrasi hukum, organisasi, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. Pelayanan kehumasan, teknologi informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta kepustakaan;

- e. Penyelenggaraan kegiatan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keprotokolan, tata usaha, sarana dan prasarana Ombudsman Republik Indonesia; dan
- g. Penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi diatur dalam Bagian Ketiga Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

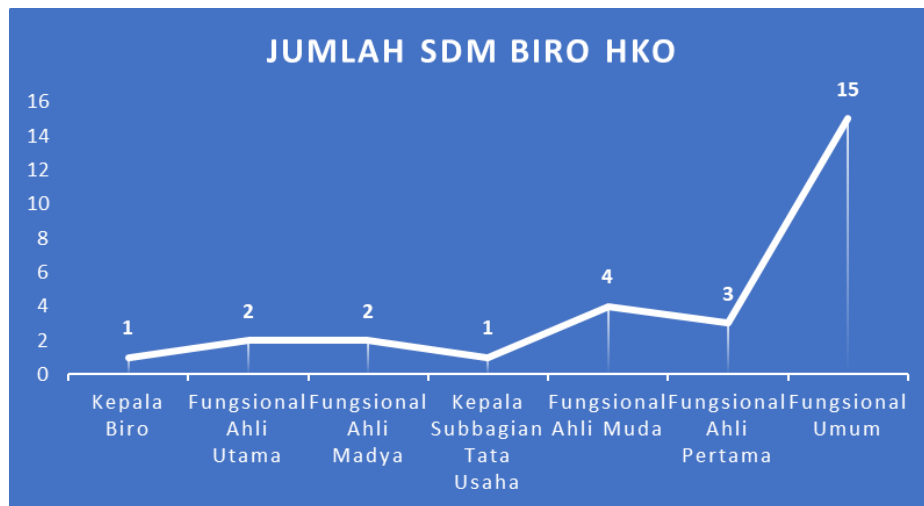
Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, diseminasi hukum, advokasi, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Ombudsman;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Biro.

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi dibantu oleh Subbagian Tata Usaha Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Pramubakti.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi ada 29 (dua puluh sembilan) orang yaitu 1 (satu) orang Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi, 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Utama, 1 (satu) Orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 2 (dua) orang Fungsional Ahli Madya, 4 (empat) orang Fungsional Ahli Muda, 3 (tiga) orang Fungsional Ahli Pratama dan 14 (empat belas) orang fungsional umum.



Gambar Grafik Jumlah SDM Biro HKO

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan, Jabatan, Pangkat golongan dan Penempatan:

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	2
2.	S2	4
3.	S1/D4	12
4.	D3	9
5.	SMA	1
Jumlah		28

No.	Pegawai Pusat	Jumlah
1.	PNS	25
2.	Pramukti	1

No.	Pegawai Perwakilan	Jumlah
1.	PNS	2

No.	PANGKAT GOL/RUANG	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	2
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
3.	Pembina Tk. I (IV/b)	2
4.	Penata Tk. I (III/d)	2
5.	Penata (III/c)	4
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
7.	Penata Muda (III/a)	6
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	4
Jumlah		27

Komposisi sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Persekjen 5 Tahun 2020
1.	Kepala Biro	1
2.	Kepala Bagian	0
3.	Kepala Subbagian	1
Jabatan Fungsional		
4.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	2
5.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1
6.	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	1
7.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	2

8.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
9.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	2
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	1
11.	Analisis Hukum Ahli Pertama	1
12.	Analisis Hukum	1
13.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	1
14.	Analisis Kerja Sama	2
15.	Analisis Tata Laksana	1
16.	Penyusun Bahan Kebijakan	1
17.	Pengolah Data Informasi Dan Hukum	3
18.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	3
19.	Pengelola Informasi Kerjasama	1
20.	Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum	1

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Sasaran Kegiatan

Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi kepada Ombudsman RI. Sekretariat Jenderal Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya menetapkan visi: “Mewujudkan dukungan administratif prima kepada Ombudsman Republik Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan.
- b. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan hukum, kerja sama, dan organisasi yang optimal.
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan teknis yang optimal.
- d. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan hubungan masyarakat dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi yang optimal.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtangaan dan pengadaan barang/jasa yang akuntabel
- f. Pelaksanaan pengawasan internal yang efektif.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi telah menetapkan perjanjian kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2024 dengan memperhatikan sumber daya dan sumber dana yang ada. Sasaran indikator, dan target kegiatan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi tahun 2024 ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen	Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	3,1
	a. Aspek Implementasi (33,3%)	
	b. Aspek Manfaat (66,7%)	

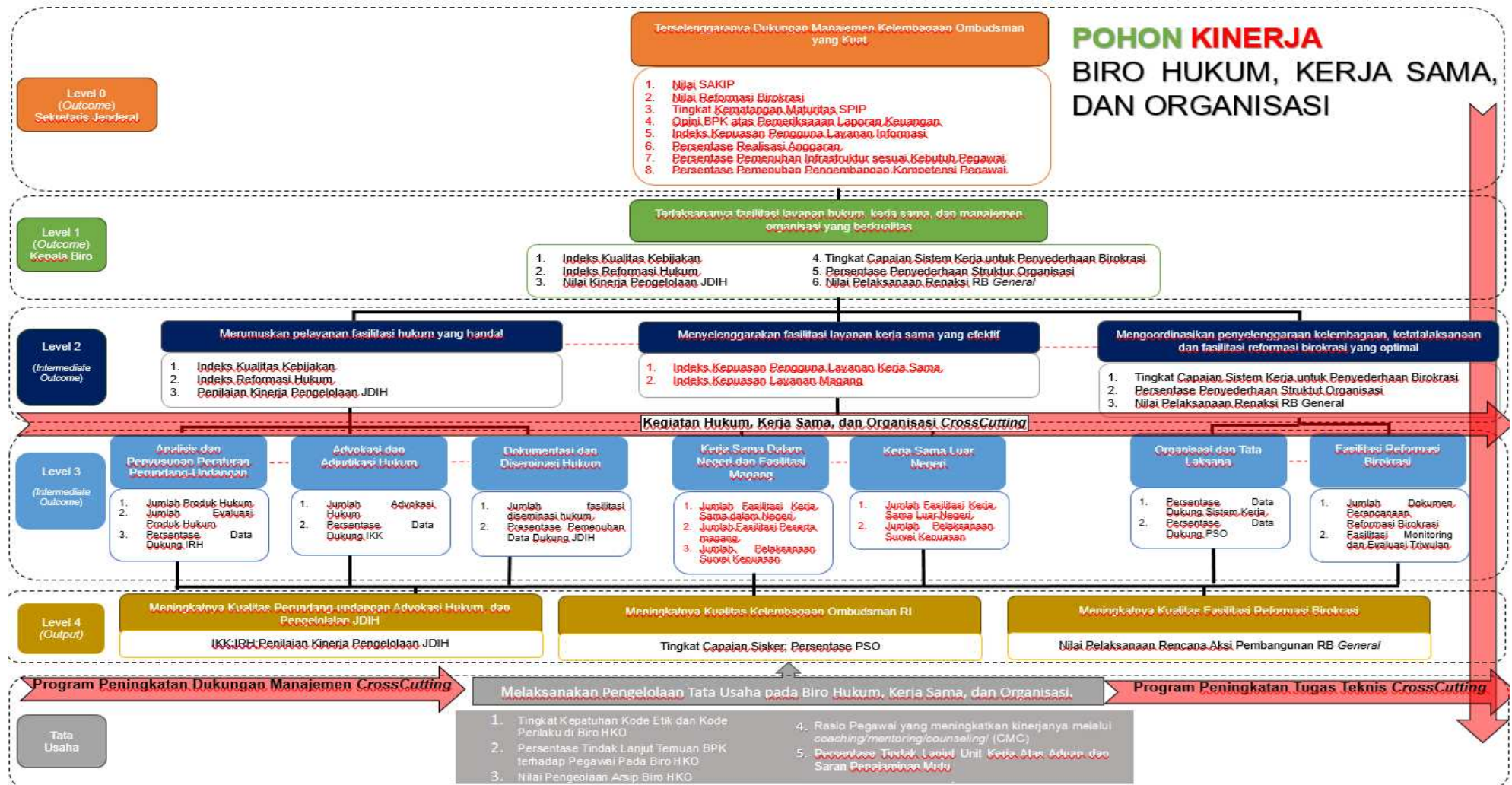
Organisasi yang berkualitas	Jumlah Laporan Kinerja, Triwulan dan Tahunan	6
-----------------------------	--	---

Tabel. Perjanjian Kinerja Kepala Biro HKO 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Waktu Penyelesaian			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Terlaksananya Fasilitas Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	3,1	0,5	1,2	1,7	3,1
	Jumlah Laporan Kinerja, Triwulan dan Tahunan	6	3	1	1	1

Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Biro HKO 2024

POHON KINERJA BIRO HUKUM, KERJA SAMA DAN ORGANISASI



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Kinerja

Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diharapkan. Capaian indeks kinerja Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi tahun 2024 telah memenuhi target dengan nilai indeks 3,37 (108,71%). Jumlah dokumen laporan yang telah disusun diantaranya 4 laporan triwulan, 1 laporan tahunan dan 1 laporan kinerja. Capaian jumlah dokumen laporan yang telah disusun belum memenuhi target dengan jumlah 6 laporan (66,67%). Capaian kinerja Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi tahun 2024 ditampilkan dalam matriks sebagai berikut:

Capaian kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mencakup berbagai aspek yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa indikator capaian kinerja dijabarkan dalam tim kerja di lingkungan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	3,1	Skala 4	3,37	108,71%
	Jumlah Laporan Kinerja, Triwulan dan Tahunan	6	Laporan	6	100%

Tabel. Capaian Perjanjian Kinerja

B. Capaian Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi dan pengelolaan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi menyelenggarakan Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat dan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal berdasarkan peraturan sekretaris jenderal nomor 5 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal ombudsman RI.

Untuk melaksanakan tugas koordinasi dan pengelolaan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi menyelenggarakan kegiatan diantaranya Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat dan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.

1. Layanan Hukum

Biro Hukum, Kerja Sama dan organisasi melakukan koordinasi dan penyusunan serta analisis penyusunan peraturan perundang-undangan, Advokasi Hukum, Dokumentasi, Diseminasi Hukum serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Layanan Hubungan Masyarakat

Biro Hukum, Kerja Sama dan organisasi melakukan fasilitasi Kerja Sama dalam Negeri dan Luar negeri serta fasilitasi layanan magang.

3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Biro Hukum, Kerja Sama dan organisasi melakukan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, fasilitasi reformasi birokrasi dan supervise penyusunan instrument tata laksana.

Sesuai perjanjian kinerja ada dua indikator kinerja yaitu indeks kinerja dan jumlah laporan yang disusun Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi selama tahun 2024.

a. Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

1) Aspek Implementasi

Aspek implementasi berupa: capaian rincian output, nilai efisiensi unit kerja, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

1. Capaian rincian output

Output Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat dan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal berupa 1 layanan. Karena bukan merupakan tahapan, capaian setiap bulan adalah 100% s.d. akhir tahun.

NO	INDIKATOR ASPEK IMPLEMENTASI	TARGET	SATUAN	TRIWULAN I s.d IV		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Layanan Hukum	6	Dokumen	6	6	100,00%
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	19	Laporan	19	19	100,00%
3	Layanan Organisasi dan tata Kelola Internal	5	Laporan	5	5	100,00%

2. Nilai efisiensi unit kerja

Efisiensi unit kerja untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Nilai Efisiensi		Maret	Juni	Septemb er	Desemb er
5093	Fasilitasi Hukum, Kerja Sama dan Organisasi	69,49 %	94,51%	58,89%	67,02%
5093.EBA.9 57	Layanan Hukum				
	Penyerapan	8,25%	16,25%	56,00%	79,85%
	Capaian RO	16,67 %	33,33%	66,67%	133,33%
	Capaian RO yang diperhitungkan	16,67 %	33,33%	66,67%	120,00%
	Efisiensi	8,42%	17,09%	10,67%	40,15%
	Efisiensi yang diperhitungkan	8,42%	17,09%	10,67%	20,00%
	Nilai Efisiensi	71,04 %	92,72%	76,66%	100,00%
5093.EBA.9 58	Layanan Hubungan Masyarakat				
	Penyerapan	10,04 %	31,05%	101,34%	98,54%
	Capaian RO	26,32 %	47,37%	73,68%	100,00%
	Capaian RO yang diperhitungkan	26,32 %	47,37%	73,68%	100,00%
	Efisiensi	16,28 %	16,32%	-27,66%	1,46%
	Efisiensi yang diperhitungkan	16,28 %	16,32%	-20,00%	1,46%
	Nilai Efisiensi	90,69 %	90,81%	0,00%	53,66%

5093.EBA.960	Layanan Orgnisasi dan Tata Kelola Internal				
	Penyerapan	1,30%	4,72%	59,98%	121,04%
	Capaian RO	0,00%	60,00%	80,00%	120,00%
	Capaian RO yang diperhitungkan	0,00%	60,00%	80,00%	120,00%
	Efisiensi	-1,30%	55,28%	20,02%	-1,04%
	Efisiensi yang diperhitungkan	-1,30%	20,00%	20,00%	-1,04%
	Nilai Efisiensi	46,75%	100,00%	100,00%	47,40%

Nilai Efisiensi Tahun 2024

3. Penyerapan Aggaran Tahun 2024

Kode		Maret	Juni	September	Desember
5093	Fasilitasi Hukum, Kerja Sama dan Organisasi	61,68%	67,43%	85,38%	72,30%
5093.EBA.957	Layanan Hukum	86%	93%	98%	76%
5093.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	95%	98%	97%	64%
5093.EBA.960	Layanan Orgnisasi dan Tata Kelola Internal	3%	11%	59,98%	77%

2) Aspek Manfaat

Aspek manfaat dengan rincian nilai sebagai berikut:

No	Indikator Aspek Manfaat	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1	Indeks Kepuasan Layanan Organisasi dan Tata Laksana	20	4	3,5	0,875	17,5
2	Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	20	100	96	0,96	19,2
3	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Hukum	10	4	3,48	0,87	8,7
4	Indeks kepuasan pengguna layanan kerja sama	10	5	4,08	0,816	8,16

5	Nilai SAKIP Biro HKO	10	100	73,75	0,7375	7,375
6	Indeks kepuasan layanan magang	5	5	4,44	0,888	4,44
7	Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Biro HKO	5	A	A	1	5
8	Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro HKO	5	100	100	1	5
9	Nilai pengelolaan arsip Biro HKO	5	100	90,32	0,9032	4,516
10	Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/ counseling (CMC)	5	100	100	1	5
11	Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	5	100	100	1	5
		100				79,891

1. Capaian penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nilai Indeks Reformasi Hukum dengan Nilai 98,8 kategori Istimewa.

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	97.30
2	Nilai Apresiasi	2.16
3	Nilai Akhir	99.46

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap upaya Ombudsman Republik Indonesia beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Hukum
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. Y. AMBEG PARAMARTA

2. Capaian penghargaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM dengan Nilai JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) 96 kategori EkaAcalapati.

II. LEMBAGA NEGARA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Mahkamah Agung	98
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	98
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	97
4.	Ombudsman Republik Indonesia	96
5.	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	95
6.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	87

3. Tim Advokasi Hukum telah memenangkan beberapa kasus di pengadilan yaitu:
 1. Kasasi perkara Nomor 233 K/TUN/2024.
 2. Kasasi perkara Nomor 421 K/TUN/KI/2024.
 3. Uji Materiil Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia register Nomor 10 P/HUM/2024.
 4. Menang dalam kasus banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara Nomor 241/B/2024/PT.TUN.JKT.
4. Terselenggaranya Kegiatan SEAOF Meeting pada tanggal 12-14 November 2024 di Hotel Le Meridien Jakarta. Pertemuan SEAOF di tanggal 12 November 2024 dihadiri oleh delegasi dari Ombudsman Filipina, Ombudsman Thailand, Ombudsman Timor Leste dan Ombudsman New Zealand. Dari hasil pertemuan Pada bulan Desember 2024 Ombudsman RI telah mengirimkan minutes of meeting pertemuan SEAOF November lalu dan meminta masukan dari seluruh anggota SEAOF. Dan saat ini Ombudsman Philipina telah resmi menjadi Ketua dan Sekretariat SEAOF Tahun 2025-2026 per tanggal 7 Desember 2024.



5. Capaian Reformasi Birokrasi dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman RI terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dan puncaknya pada 2023 yang berada pada kategori BB atau sangat baik, serta lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/Lembaga.



<https://www.antaraneews.com/berita/4535238/kementerian-panrb-apresiasi-capaian-reformasi-birokrasi-ombudsman-ri>

6. Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024

Pengawasan kearsipan internal telah dilaksanakan pada unit kerja di lingkungan Ombudsman RI. Penilaian pengawasan kearsipan menilai aspek

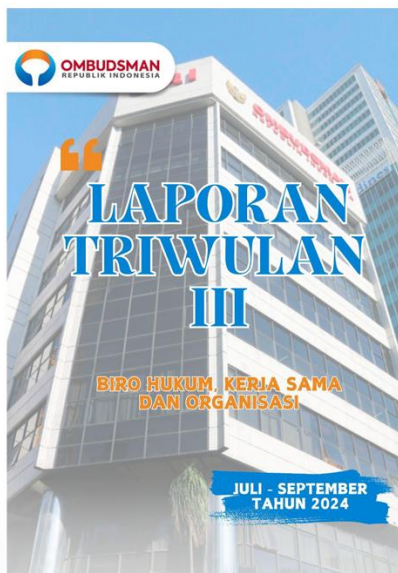
pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Sumber daya kearsipan meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana. Nilai hasil pengawasan kearsipan internal telah diverifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Nilai hasil pengawasan kearsipan internal telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman nomor 265 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan dan Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi tahun 2024 adalah 90,32 (AA).



7. Jumlah dokumen laporan kinerja triwulan dan tahunan Biro HKO
Jumlah dokumen laporan yang telah disusun oleh Biro Hukum, Kerja sama, dan Organisasi pada tahun 2024 diantaranya: 1 Laporan Tahunan, 4 Laporan Triwulan, dan 1 Laporan kinerja.

Dokumen Laporan Biro HKO





C. Evaluasi Keberhasilan Kinerja

Indeks kinerja Biro Hukum, Kerja Sama dan organisasi diukur berdasarkan nilai kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat. Bobot aspek implementasi adalah 33,3 dan aspek manfaat adalah 66,7%. Rumus perhitungan indeks kinerja sebagai berikut:

$$IK = (NKI \times W_{NKI}) + (NKM \times W_{NKM})$$

$$W_{NKI} = 1,33 \text{ (33,3\% dari indeks 4);}$$

$$W_{NKM} = 2,67 \text{ (66,7\% dari indeks 4)}$$

Keterangan:

IK : Indeks kinerja

NKI : Nilai kinerja atas aspek implementasi

NKM : Nilai kinerja atas aspek manfaat

W_{NKI} : Bobot nilai kinerja atas aspek implementasi

W_{NKM} : Bobot nilai kinerja atas aspek manfaat

Perhitungan Aspek Implementasi

$$NKI = (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E) + (K \times W_K) + (P \times W_P)$$

$$W_{CRO} = 43,5\%; W_E = 28,6\%; W_K = 18,2\%; W_P = 9,7\%$$

Keterangan:

NKI : Nilai kinerja atas aspek implementasi

CRO : Capaian rincian output

W_{CRO} : Bobot capaian rincian output

NE : Nilai efisiensi unit kerja

W_E : Bobot nilai efisiensi unit kerja

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_K : Bobot konsistensi penyerapan anggaran

P : Penyerapan anggaran

W_P : Bobot penyerapan anggaran

❖ Capaian Rincian Output (CRO)

$$CRO = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{n}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian rincian output

RVRO_i : Realisasi volume rincian output i

TVRO_i : Target volume rincian output i

n : jumlah rincian output

❖ Nilai Efisiensi Unit Kerja (NE)

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)}$$

Keterangan:

E_{RO} : Efisiensi rincian output

AARO_i : Alokasi anggaran rincian output i

RARO_i : Realisasi anggaran rincian output i

CRO_i : Capaian rincian output i

n : jumlah rincian output

❖ Konsistensi Penyerapan Anggaran (K)

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK_n : Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n

RPDK_n : Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n : jumlah bulan

❖ Penyerapan Anggaran (P)

$$P = \left(\frac{RA}{AA} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan anggaran

RA : Realisasi anggaran

AA : Alokasi anggaran

Selama tahun 2024 monitoring indikator kinerja Biro Hukum, Kera Sama, dan Organisasi atas aspek implementasi dan aspek manfaat terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Indeks Kinerja (Skala 4) Aspek	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Implementasi: 33,33% Aspek Manfaat: 66,67%	2,48	2,48	2,63	2,75	2,80	2,95	3,02	3,05	3,08	3,21	3,35	3,37
Aspek Implementasi (%)	26,64	26,51	37,96	46,53	50,37	61,38	67,08	68,98	71,35	81,26	92,03	93,24
Aspek Manfaat (%)	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89

D. Kinerja Anggaran

Rincian penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
5093.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal HKO	2.863.311.000	2.859.627.153	3.683.847
957.051	Layanan Hukum	305.275.000	305.116.139	158.861
958.051	Layanan Hubungan Masyarakat	2.245.080.000	2.242.091.781	2.988.219
960.051	Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	312.956.000	312.419.233	536.767

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian capaian indikator tersebut, menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi termasuk kategori berhasil.

B. Saran dan Solusi

1. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia.
2. Perlu adanya sistem untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat selalu dipantau oleh ketua tim kerja, sehingga saat terdapat kegiatan yang membutuhkan bantuan dapat segera ditangani.
3. Perlu dibuat aplikasi atau akses untuk merekap penggunaan anggaran dan kinerja masing-masing Tim Kerja.
4. serta mengusulkan untuk dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Biro.